

BAB I

PENDAHULUAN

Logo UNJ FTNBR RGB_Logo_Only.jpg 986x994 piksel

16/01/25 16:48

1.1 Latar Belakang

Pendidikan memiliki peran strategis dalam menciptakan warga negara yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga bermoral, beretika, serta beriman dan bertakwa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini sejalan dengan esensi tujuan pendidikan, yaitu memanusiakan manusia. Sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 4, yang menyatakan bahwa negara bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Lebih lanjut, Pasal 31 ayat 3 UUD 1945 menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Prinsip ini dipertegas dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 4 ayat 5, yang menekankan pentingnya budaya membaca, menulis, dan berhitung sebagai pondasi utama pendidikan. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berfokus pada pengembangan kemampuan intelektual, tetapi juga pada pembentukan karakter, moral, dan spiritual siswa, sebagai bagian dari upaya holistik untuk menciptakan generasi yang berkualitas dan berintegritas.

Karakter dapat diperkuat melalui aktivitas membaca, yang tidak hanya meningkatkan kemampuan literasi tetapi juga memperkaya wawasan, membentuk nilai-nilai moral, dan memperdalam pemahaman spiritual (Putri & Rohman, 2022). Keseimbangan ini penting untuk menciptakan generasi yang tidak hanya kompeten secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas dan kesadaran sosial yang tinggi. Dengan demikian, individu yang terdidik dengan baik akan mampu berkontribusi secara signifikan pada kemajuan bangsa, baik melalui inovasi, pengambilan keputusan yang bijaksana, maupun penerapan nilai-nilai luhur yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan harmoni sosial.

http://repository.unj.ac.id/1280/RW/Logo%20UNJ%20FTNBR%20RGB_Logo_Only.jpg

Halaman 1 dari 1

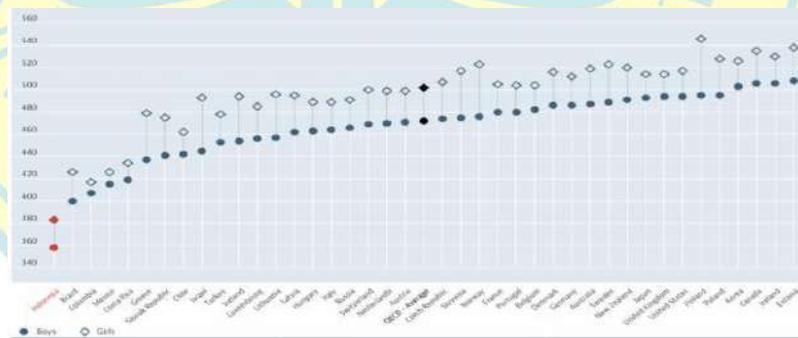
Membaca sebaiknya ditanamkan sebagai kebiasaan yang dibudayakan sejak usia dini, baik di lingkungan sekolah maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Literasi membaca merupakan elemen fundamental dalam mencerdaskan kehidupan manusia, karena hampir seluruh proses pembelajaran berlandaskan pada kemampuan membaca. Dalam praktik literasi, anak-anak tidak hanya diajarkan untuk membaca teks, tetapi juga dilatih untuk memahami makna dan pesan yang terkandung di dalamnya, sehingga mereka dapat mengaplikasikannya dalam konteks kehidupan nyata (Herlina, 2019). Kemampuan membaca menjadi fondasi utama untuk mengembangkan berbagai literasi dasar, seperti literasi numerasi, sains, digital, finansial, serta budaya dan kewarganegaraan. Literasi tidak hanya mendukung penguasaan pengetahuan, tetapi juga membekali anak-anak dengan keterampilan berpikir kritis dan pemahaman yang holistik, yang esensial untuk keberhasilan mereka di masa depan.

Fenomena yang terjadi UNESCO (2012) menunjukkan data bahwa indeks minat baca di Indonesia hanya mencapai 0,001, yang berarti hanya satu dari setiap 1.000 orang di Indonesia memiliki minat membaca. Padahal, menumbuhkan minat baca sejak dini merupakan langkah penting untuk membangun kebiasaan membaca yang berkelanjutan. Minat baca yang tinggi, apabila didukung oleh ketersediaan bahan bacaan yang berkualitas dan mudah diakses, dapat mendorong terbentuknya budaya membaca dan menulis, baik di lingkungan sekolah maupun dalam masyarakat.

Miller & McKenna (2016) juga mengungkapkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-60 dari 61 negara dalam hal literasi, hanya berada satu tingkat di atas Botswana dan di bawah Thailand. Temuan ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam kemampuan membaca, menulis, dan memahami informasi di kalangan masyarakat Indonesia. Rendahnya kemampuan literasi ini dapat memengaruhi kemampuan berpikir kritis, keterampilan kognitif, dan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan. Peringkat literasi yang rendah ini menekankan

perlu kebijakan dan program yang lebih efektif untuk meningkatkan minat baca, akses terhadap buku, dan keterampilan literasi di Indonesia.

Data PISA tahun 2018 yang dirilis pada 2019 menunjukkan hasil Indonesia yang tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Indonesia berada di peringkat 72 dari 78 negara peserta, dengan skor 371, yang masih di bawah rata-rata global sebesar 487 (Haryati, 2020). Hasil PISA 2018 mencatat bahwa sekitar 8,7% siswa di negara-negara OECD berhasil mencapai prestasi tinggi dalam membaca, ditandai dengan pencapaian Level 5 atau 6 dalam tes membaca *Programme for International Student Assessment* (PISA). Pada level ini, siswa mampu memahami teks panjang, menangani konsep abstrak atau nonintuitif, serta membedakan antara fakta dan opini dengan mempertimbangkan petunjuk implisit terkait isi atau sumber informasi. Sementara itu, Indonesia hingga tahun 2018 masih berada pada Level 2 dalam kemampuan membaca.



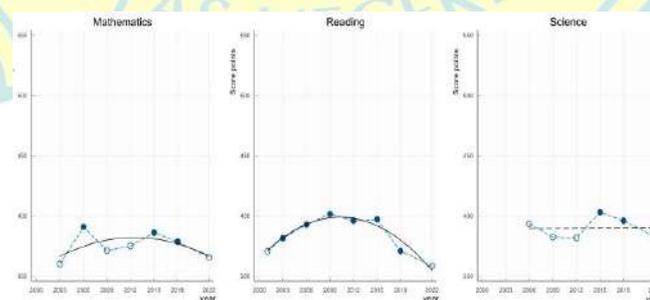
Gambar 1.1 Reading performance (PISA) 2018
Sumber : OECD Data

Performa membaca siswa laki-laki dan perempuan dalam PISA 2018 secara umum didapati, siswa perempuan memiliki skor yang lebih tinggi daripada siswa laki-laki dalam hampir semua negara yang ditampilkan pada gambar grafik 1.1. Sumbu vertikal menunjukkan skor rata-rata dalam kemampuan membaca, sementara sumbu horizontal menampilkan negara-negara yang ikut serta.

Setiap negara memiliki dua titik yang menunjukkan rata-rata skor

membaca laki-laki dan perempuan. Titik berwarna biru tua (bulat) mewakili skor siswa laki-laki, dan titik berlian biru muda mewakili skor siswa perempuan. Beberapa negara juga memiliki rata-rata yang ditandai dengan titik hitam (berlian) di posisi tengah. Negara-negara seperti Finlandia, Kanada, Irlandia, Korea, dan Estonia berada di sisi kanan grafik, menunjukkan skor membaca yang lebih tinggi untuk siswa laki-laki dan perempuan. Grafik pada gambar 1.1 menunjukkan bahwa performa membaca siswa Indonesia relatif rendah dibandingkan dengan negara lain. Selain itu, grafik tersebut juga mengungkapkan adanya perbedaan signifikan dalam skor membaca antara siswa laki-laki dan perempuan di sebagian besar negara yang dianalisis.

Data PISA 2022 yang dirilis pada 5 Desember 2023 mengungkapkan pencapaian skor siswa Indonesia dalam tiga bidang utama: numerasi dengan skor 366, literasi dengan skor 359, dan sains dengan skor 383. Grafik tren berikut memberikan gambaran mendalam tentang perkembangan dan perbandingan pencapaian skor siswa di setiap bidang tersebut dari waktu ke waktu, menunjukkan pola dan perubahan yang signifikan dalam kualitas pendidikan.



*Gambar 1.2 Tren Pencapaian Matematika, Membaca dan Sains
Sumber: OECD, PISA 2022*

Grafik tersebut menjelaskan bahwa hasil rata-rata PISA tahun 2022 menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun 2018 di bidang matematika, membaca, dan sains. Secara keseluruhan, pencapaian pada tahun 2022 adalah yang terendah dalam sejarah pengukuran PISA untuk ketiga mata pelajaran tersebut, setara dengan hasil tahun 2003 dalam

membaca dan matematika, serta tahun 2006 dalam sains. Selain itu, pada tabel *Snapshot Reading* yang diterbitkan PISA bila dibandingkan dengan tahun 2012, proporsi siswa yang mendapatkan skor di bawah tingkat kecakapan dasar (level 2) meningkat lima poin persentase dalam matematika, 19 poin persentase dalam membaca, dan tidak menunjukkan perubahan signifikan dalam sains.

Tabel. 1.1 Snapshot Reading PISA

Tahun PISA	Score Membaca	Tren Rata-rata PISA Tahun 2012-2022
PISA 2000	371	N/A
PISA 2003	382	N/A
PISA 2006	393	N/A
PISA 2009	402	N/A
PISA 2012	396	-42.1
PISA 2015	397	-42.1
PISA 2018	371	-42.1
PISA 2022	369	-42.1

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada tahun 2017 melaporkan bahwa peringkat literasi Indonesia mengalami penurunan yang signifikan selama dua dekade terakhir. Pada tahun 2000, Indonesia berada di peringkat ke-39 dari 41 negara yang mengikuti survei. Kondisi ini semakin memburuk pada tahun 2003, ketika posisi Indonesia turun menjadi ke-39 dari 40 negara. Pada tahun 2006, Indonesia menempati peringkat ke-48 dari 56 negara, mencerminkan bahwa tantangan dalam meningkatkan literasi masih belum teratasi.

Pada tahun 2009, posisi Indonesia kembali merosot ke peringkat ke-57 dari 65 negara. Tren penurunan ini berlanjut pada tahun 2015, dengan Indonesia berada di peringkat ke-69 dari 76 negara yang disurvei. Data tersebut menegaskan perlunya perhatian yang lebih serius terhadap upaya peningkatan kualitas literasi di Indonesia. Sebagai upaya memahami perkembangan literasi secara lebih komprehensif, data hasil *Programme for International Student Assessment* (PISA) dari tahun 2018 hingga 2022 disajikan dalam tabel berikut untuk mendukung

analisis kondisi literasi di Indonesia.

Tabel 1.2 Peringkat literasi Indonesia 2000 hingga 2022

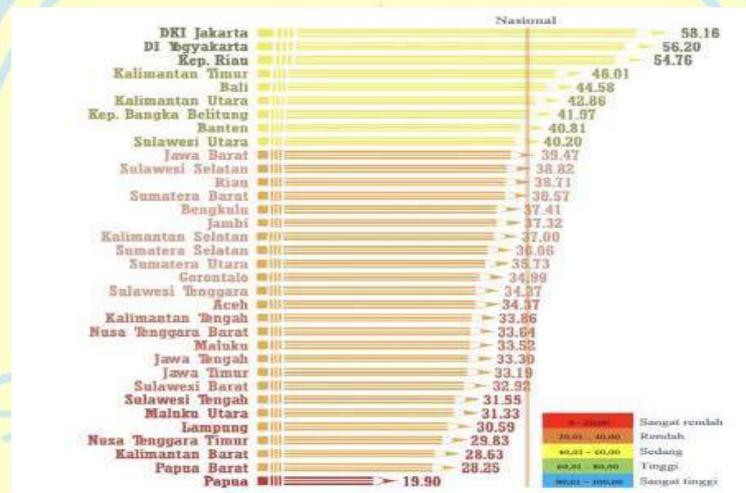
Tahun PISA	Literacy Ranking	Total Negara Peserta
PISA 2000	39	41
PISA 2003	39	40
PISA 2006	48	56
PISA 2009	57	65
PISA 2012	60	62
PISA 2015	69	76
PISA 2018	72	78
PISA 2022	71	78

Koordinator fungsi peserta didik dari Direktorat Sekolah Dasar Kemendikbud, dalam sebuah webinar pada Sabtu, 19 Desember 2020, menyampaikan bahwa “membaca seharusnya tidak hanya sekadar menggabungkan huruf-huruf menjadi kalimat, tetapi juga harus dapat dipahami oleh anak-anak.” Untuk mendukung pemahaman literasi yang lebih mendalam, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengembangkan Indeks Aktivitas Literasi Membaca (Alibaca) sebagai alat untuk mengukur tingkat literasi membaca di kalangan pelajar. Indeks ini mencakup empat dimensi utama, yaitu kecakapan, akses, alternatif, dan budaya.

- 1) Dimensi kecakapan (*proficiency*) menggambarkan tingkat kemampuan masyarakat dalam memahami bahan bacaan.
- 2) Dimensi akses (*access*) memberikan gambaran mengenai ketersediaan perpustakaan dan fasilitas bacaan lainnya.
- 3) Dimensi alternatif (*alternatives*) mencerminkan opsi yang disediakan oleh perangkat elektronik dan digital untuk mengakses informasi, baik di sekolah maupun masyarakat.
- 4) Dimensi budaya (*culture*) menunjukkan sejauh mana kebiasaan atau perilaku masyarakat dalam mengakses bahan-bahan literasi.

Indeks Alibaca ini menggunakan lima kategori tingkat aktivitas,

yaitu sangat rendah (0–20,00), rendah (20,01–40,00), sedang (40,01–60,00), tinggi (60,01–80,00), dan sangat tinggi (80,01–100,00). Melalui pembagian kategori ini, Kemendikbud bertujuan untuk memantau sekaligus berupaya mencari cara meningkatkan aktivitas membaca di kalangan pelajar. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada kebiasaan membaca, tetapi juga pada peningkatan pemahaman membaca yang berkelanjutan, khususnya di tingkat sekolah dasar.



Gambar 1.3 Indeks Alibaca Nasional 2019

Rendahnya literasi di Indonesia juga tercermin dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakkidbud), Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemendikbud. Berdasarkan Indeks Alibaca 2019, hanya sembilan provinsi yang masuk dalam kategori "sedang", sementara 24 provinsi diklasifikasikan sebagai "rendah", dan satu provinsi berada dalam kategori "sangat rendah". Rata-rata Indeks Alibaca nasional tercatat pada angka 37,32%, yang menunjukkan bahwa tingkat literasi membaca di Indonesia masih tergolong rendah. Dalam peta distribusi Indeks Alibaca, terdapat satu provinsi yang diwarnai merah (sangat rendah), 24 provinsi berwarna jingga (rendah), dan sembilan provinsi berwarna kuning (sedang), sementara belum ada provinsi yang masuk dalam kategori hijau atau biru, yang menunjukkan tingkat literasi yang sangat baik. Selanjutnya, data 2019 terkait Indeks Alibaca nasional dapat dilihat pada

grafik Indeks Alibaca pada Gambar 1.3.

Sementara itu, hasil penghitungan Indeks Alibaca yang disajikan pada Gambar 1.3 menunjukkan bahwa rata-rata Indeks Alibaca Nasional berada dalam kategori aktivitas literasi rendah, yaitu pada angka 37,32. Rincian nilai tersebut meliputi: dimensi Kecakapan sebesar 75,92; dimensi Akses sebesar 23,09; dimensi Alternatif sebesar 40,49; dan dimensi Budaya sebesar 28,50. Data ini mencerminkan bahwa meskipun ada beberapa dimensi yang menunjukkan nilai cukup baik, secara keseluruhan aktivitas literasi di Indonesia masih memerlukan perhatian serius untuk perbaikan di berbagai aspek.

Hasil analisis dari empat dimensi Alibaca menunjukkan bahwa dimensi kecakapan memperoleh skor tertinggi dibandingkan dimensi lainnya. Dimensi alternatif juga mencatat hasil yang cukup positif, mencerminkan bahwa masyarakat mulai memanfaatkan perangkat teknologi informasi. Namun, akses terhadap komputer dan internet masih perlu ditingkatkan agar pemerataannya lebih merata. Di sisi lain, rendahnya skor pada dimensi akses dan dimensi budaya menyoroti pentingnya perhatian lebih terhadap kedua dimensi ini, karena kontribusinya yang signifikan terhadap rendahnya indeks literasi secara keseluruhan.

Sejalan dengan laporan Puslitjakkidbud (2019), perhitungan Indeks Alibaca nasional menunjukkan pola yang konsisten: dimensi kecakapan mencatat skor sangat tinggi, diikuti oleh dimensi alternatif dan dimensi budaya, sementara dimensi akses memiliki skor yang paling rendah. Hasil ini menekankan perlunya kebijakan strategis untuk meningkatkan akses dan membangun budaya literasi secara berkelanjutan. Gambaran lebih rinci terkait distribusi skor tiap dimensi dapat dilihat pada Gambar 1.4 di bawah ini.



Gambar 1.4. Indeks Kriteria Sesuai Dimensi

Inisiatif untuk meningkatkan literasi diumumkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 23 tahun 2015 mengenai Penumbuhan Budi Pekerti. Pada bagian F VI dari peraturan tersebut dijelaskan bahwa sebelum proses belajar dimulai, guru memberikan peluang kepada siswa untuk membaca buku-buku yang menarik, selain dari buku-buku pelajaran. Kegiatan yang kemudian disebut Gerakan Literasi Sekolah ini diharapkan dapat membangun kebiasaan membaca dan meningkatkan keterampilan membaca, sehingga pengetahuan dapat dikuasai dengan lebih baik. Selain itu Permendikbud tersebut didukung dengan Undang-undang (UU) No. 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan yang didalamnya mengungkapkan bahwa “bahwa buku sebagai salah satu sarana membangun dan meningkatkan budaya literasi masyarakat Indonesia perlu mendapatkan perhatian khusus guna mendorong masyarakat berperan dalam tingkat global”. Penerapan gerakan literasi sekolah dilaksanakan bertujuan untuk membentuk sekolah sebagai wadah pendidikan yang memiliki budaya literat (Kemendikbud, 2019).

Gerakan Literasi Sekolah (GLS) merupakan inisiatif dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang cukup efektif dan strategis dalam membangun karakter bangsa, meskipun tantangan yang dihadapi masih signifikan. Melalui pemantauan pelaksanaan GLS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2019) sepanjang tahun 2016 tercatat sebanyak 5.360 sekolah (lintas jenjang pendidikan) telah melakukan peningkatan kapasitas dan menjalankan kegiatan 15 menit membaca sebelum pelajaran dimulai, angka tersebut di luar

sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan program gerakan literasi sebelum GLS diluncurkan pada 2016.

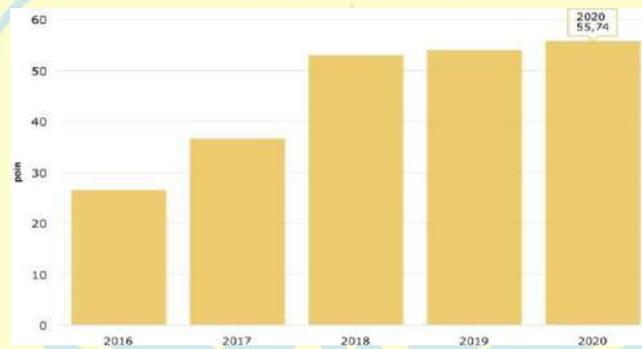
Rokayah (2017) membentuk karakter bangsa Indonesia tentu harus diawali dengan membentuk karakter para generasi mudanya dalam hal ini adalah peserta didik. Budaya literasi yang di tumbuh kembangkan di sekolah penggerak maupun pada masyarakat bukan semata karena keikutsertaan Indonesia dalam kurun waktu 20 tahun hasil survey *Programme Internasional Student Assessment (PISA)* menunjukkan rendahnya skor minat baca, kemampuan numerasi, dan sains. Selain pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai nilai-nilai Pancasila, sekolah penggerak juga diharapkan mampu melakukan percepatan digital sehingga setiap warga sekolah mengoptimalkan kemampuannya <https://psp-web.pauddikdasmen.kemdikbud.go.id>.

Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) periode 2018-2020 melaporkan perkembangan positif dalam kemampuan membaca dan akses internet di kalangan penduduk berusia di atas 5 tahun di Indonesia. Pada tahun 2018, Sumatera Selatan mencatat persentase tertinggi dengan 99,91%, diikuti oleh DKI Jakarta dengan 99,72% pada tahun 2019, dan Kepulauan Riau dengan 99,55% pada tahun 2020. Provinsi Maluku juga mencatat prestasi mengesankan dengan persentase 98,86% dalam kemampuan akses internet disertai kemampuan membaca.

Meski demikian terjadi peningkatan persentase juga pada individu yang memiliki akses internet tetapi tidak disertai kemampuan membaca, angka sebesar 0,81% pada Kalimantan Utara pada 2018 dan 2,21% di Nusa Tenggara Barat pada 2020. Data ini secara keseluruhan menunjukkan kemajuan signifikan dalam literasi dan konektivitas digital di Indonesia, ini merupakan langkah penting menuju peningkatan kualitas pendidikan dan keterhubungan digital di masa depan.

Martutik (2019) menjelaskan bahwa salah satu upaya untuk mencerdaskan siswa di sekolah dan mengoptimalkan gerakan literasi

adalah dengan mengoptimalkan fungsi dan peran perpustakaan. Mujiburrahman dkk. (2020) juga mengungkapkan gerbang masuk untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan minat baca serta budaya literasi anak Indonesia dapat dilakukan dengan penyediaan bahan bacaan. Apabila konsep manajemen perpustakaan ini diterapkan dengan baik, perpustakaan tidak hanya akan mencapai tujuannya, tetapi juga berperan sebagai pendukung utama gerakan literasi di sekolah.



*Gambar 1.5. Kegemaran membaca 2016-2020
Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia*

Pada grafik kegemaran membaca, terlihat bahwa pada tahun 2020 sebesar 55,74% aktivitas membaca dilakukan di perpustakaan, mengalami peningkatan sebesar 1,9 poin dibandingkan tahun 2019 yang tercatat sebesar 53,84%. Namun, meskipun terdapat peningkatan aktivitas membaca di perpustakaan, tantangan dalam penyediaan akses terhadap fasilitas membaca masih menjadi kendala. Menurut Puslitjakkidbud (2019), "akses di sekolah termasuk dalam kategori sangat rendah, yang terlihat dari minimnya jumlah perpustakaan sekolah yang dalam kondisi baik serta belum memadainya jumlah petugas pengelola perpustakaan sekolah. Sedangkan akses di masyarakat meliputi keberadaan perpustakaan umum, perpustakaan komunitas, serta rumah tangga yang membeli surat kabar dan majalah."

Hal ini menunjukkan bahwa tingginya minat membaca tanpa didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana yang memadai akan tetap memengaruhi hasil literasi siswa di Indonesia. Oleh karena itu,

upaya perbaikan literasi memerlukan pendekatan holistik yang tidak hanya mendorong minat membaca, tetapi juga memastikan tersedianya infrastruktur literasi yang mendukung, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

Dalam melaksanakan program gerakan literasi pada kurikulum merdeka tentunya sangat dibutuhkan anggaran agar program dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan mitra seperti komite orangtua, alumni, dan DUDI dalam penerapannya (Ditjen SMP, 2019). Kolaborasi dengan mitra atau publik tentu akan memberikan peluang bagi lingkungan diluar sekolah untuk bersinergi dalam penerapan program gerakan literasi, diperkuat dengan anggran BOS kinerja yang diterima oleh sekolah penggerak selama tiga tahun tentu akan memaksimalkan pelaksanaan program gerakan literasi. Negara-negara maju pun meyakini bahwa kegiatan membaca merupakan salahsatu sarana yang dapat digunakan untuk mendapatkan berbagai informasi, pemahaman baru dan pengetahuan yang luas tentang dunia.

Hal yang cukup menggembirakan terlihat dari hasil survey Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 terdapat penurunan yang cukup signifikan pada jumlah penduduk buta aksara. Persentase buta aksara tahun 2019 sebanyak 1,78% atau 3.081.136 orang dan pada tahun 2020 turun menjadi 1,71%, atau menjadi 2.961.060 orang. Keberhasilan pemerintah dalam memberantas buta aksara dan meluaskan akses pendidikan sayangnya belum diikuti dengan keberhasilan dalam menumbuhkan budaya baca masyarakat, sehingga tingkat literasi masyarakat Indonesia masih tergolong rendah.

Salah satu tantangan utama GLS merupakan infrastruktur perpustakaan sekolah dan ketersediaan tenaga pengelola perpustakaan yang masih sangat kurang memadai. Data menunjukkan bahwa sekitar 61,45% dari total sekolah dasar (SD) yang terdaftar memiliki perpustakaan, namun hanya 19% yang berada dalam kondisi baik. Sementara itu, di tingkat sekolah menengah pertama (SMP), sekitar 76,25% sekolah memiliki perpustakaan, namun hanya 22% yang

kondisinya dianggap baik. Tahun 2017 didapati Sekolah Menengah Atas (SMA) yang memiliki perpustakaan sekitar 76,40 persen, dan hanya 33% yang kondisinya baik. Sedangkan untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), sekitar 60,34% memiliki perpustakaan, dan hanya 27% yang kondisinya baik (Kemendikbud, 2017). Sarana yang kurang mendukung tentu akan sangat mempengaruhi kemampuan membaca dan menulis, sehingga berdampak pada bangsa yang kurang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, yang akan menyebabkan rendahnya daya saing sumber daya manusia dan kemampuan literasi suatu bangsa (Wandasari, 2017).

Menyadari kondisi rendahnya kompetensi literasi bangsa Indonesia dan indeks alibaca, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selanjutnya membuat temuan terhadap pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK). Asesmen ini dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar-mengajar, yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Asesmen Nasional menghasilkan informasi untuk memantau a) perkembangan mutu dari waktu ke waktu, dan b) kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan misalnya kesenjangan antarkelompok sosial ekonomi dalam satuan pendidikan, kesenjangan antara satuan pendidikan negeri dan swasta di suatu wilayah, kesenjangan antardaerah, ataupun kesenjangan antar kelompok berdasarkan atribut tertentu.

Hadirnya Program Sekolah Penggerak pada tahun 2021 merupakan langkah penting yang diambil pemerintah untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Program ini bertujuan untuk mewujudkan visi pendidikan yang berdaulat, mandiri, dan menghasilkan profil pelajar Pancasila (Musa dkk., 2022). Dalam menjalankan perannya, Program Sekolah Penggerak berfokus pada pencapaian hasil belajar yang holistik (Kemendikbud, 2021), yang mencakup peningkatan budaya literasi di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Untuk mewujudkan hal ini, kolaborasi antara sekolah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait

menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menerapkan Kurikulum Merdeka. Program Sekolah Penggerak dirancang untuk mempercepat perkembangan sekolah-sekolah yang terlibat, dengan harapan dapat maju satu atau dua tahap lebih cepat dalam waktu tiga tahun. Tujuan akhirnya adalah agar sekolah-sekolah ini dapat mencapai tahap keempat dari proses peningkatan kualitas pendidikan yang terukur (<https://psp-web.pauddikdasmen.kemdikbud.go.id>), yang menandai transformasi menyeluruh dalam sistem pembelajaran dan pengembangan karakter siswa.

Program sekolah penggerak bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar yang holistik, seperti yang dinyatakan oleh Kemendikbud (2021). Fokus ini mencakup peningkatan budaya literasi di kalangan siswa, yang dianggap esensial untuk mendukung penguasaan kurikulum merdeka. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk orang tua, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menerapkan program ini. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi serta kebijakan program yang dapat dilanjutkan, diperbaiki, dihentikan, atau disebarluaskan, serta merekomendasikan program Gerakan Literasi yang dapat dijadikan acuan untuk sekolah penggerak maupun non-penggerak.

Pada tahapan tersebut hasil belajar siswa sekolah penggerak diharapkan sudah berada pada level yang diharapkan, lingkungan belajar di sekolah juga aman, inklusif, dan menyenangkan. Pada tahap tersebut kegiatan pembelajaran yang dilakukan juga terpusat pada peserta didik (*student centered learning*), mampu merancang program dengan anggaran berbasis refleksi, serta kepala sekolah dan guru aktif mengembangkan komunitas belajar dengan rekan sejawat (pengimbasan).



Gambar 1.6. Desain Kolaborasi Sekolah Penggerak
 Sumber: <https://psp-web.pauddikdasmn.kemdikbud.go.id>

Melalui laman www.pauddikdasmn.kemenristek.go.id intervensi holistik dalam sekolah penggerak “mulai dari SDM sekolah, pembelajaran, perencanaan, digitalisasi, dan pendampingan Pemerintah Daerah”. Kolaborasi berbagai unsur juga diperlukan agar mendapatkan hasil yang maksimal terhadap kurikulum merdeka diantaranya dengan orangtua, mitra, pelatih ahli, kepala sekolah, komite pembelajaran guru, guru dan siswa yang kemudian terlihat pada gambar 1.6. Sekolah Penggerak dalam penerapan belajar mengajar mengimplementasikan kurikulum merdeka sebagai pembelajaran paradigma baru, kurikulum diterapkan dengan mengacu pada prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga pembelajaran didalam kelas dapat disesuaikan dengan tahap perkembangan dan kebutuhan siswa (Sekolah Penggerak, 2021).

Terdapat enam tema dalam Profil Pelajar Pancasila diantaranya beriman kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Keenam tema tersebut kemudian diterapkan dalam kegiatan program intrakurikuler dan program kokurikuler, yang diterapkan selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

Program intrakurikuler meliputi berbagai elemen penting, seperti pembelajaran yang terdiferensiasi, capaian pembelajaran (CP) yang disederhanakan, serta waktu yang lebih fleksibel bagi siswa untuk

mendalami konsep dan kompetensi mereka. Selain itu, perangkat ajar yang disiapkan oleh guru disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing siswa, sehingga memungkinkan pendekatan yang lebih personal dalam pembelajaran (Sekolah Penggerak, 2021). Di sisi lain, program kokurikuler mencakup kegiatan lintas mata pelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan karakter dan kompetensi diri siswa. Kegiatan pembelajaran di luar kelas yang bersifat interdisipliner, serta keterlibatan mitra dan masyarakat juga menjadi bagian integral dari program kokurikuler. Selain itu, muatan lokal yang relevan dengan isu-isu global dan nasional yang sedang berkembang turut dimasukkan dalam kegiatan tersebut.

Sekolah Penggerak dilaksanakan dengan lima intervensi utama yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, salah satunya adalah penguatan sumber daya manusia (SDM) di sekolah. Upaya penguatan ini melibatkan berbagai elemen penting seperti kepala sekolah, pengawas sekolah, penilik, dan guru. Untuk mencapai tujuan ini, kegiatan lokakarya dan pendampingan intensif diselenggarakan secara rutin. Fasilitator ahli yang disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) memainkan peran penting dalam mendampingi para pendidik.

Pendampingan intensif memberikan kesempatan bagi para pendidik untuk mendapatkan bimbingan langsung dalam menerapkan strategi pembelajaran inovatif, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan menyeluruh bagi siswa, serta memaksimalkan potensi mereka.

Alokasi waktu mata pelajaran SMP Asumsi 1 Tahun = 36 minggu (Kls 7-8)	K13		pembelajaran di Sekolah Penggerak		
	Per Tahun	Per Minggu	Kegiatan reguler/minggu (tahun)	Projek (minimal 20% dari total per tahun)	TOTAL JP PER TAHUN
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*	108	3	72 (2)	36 (33%)	108
Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti*	108	3	72 (2)	36 (33%)	108
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti*	108	3	72 (2)	36 (33%)	108
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti*	108	3	72 (2)	36 (33%)	108
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti*	108	3	72 (2)	36 (33%)	108
Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti*	108	3	72 (2)	36 (33%)	108
Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Budi Pekerti*	108	3	72 (2)	36 (33%)	108
PPKn	108	3	72 (2)	36 (33%)	108
Bahasa Indonesia	216	6	170 (5)**	46 (21%)	216
Matematika	180	5	144 (4)	36 (20%)	180
IPA	180	5	144 (4)	36 (20%)	180
IPS	144	4	108 (3)	36 (25%)	144
Bahasa Inggris	144	4	108 (3)	36 (25%)	144
P.JOK	108	3	72 (2)	36 (33%)	108
Informatika	72	2	72 (2)	36 (33%)	108
Pilihan minimal 1: a) Seni Musik, b) Seni Rupa, c) Seni Teater, d) Seni Tari, e) Prakarya (pilihan: Kerajinan, Rekayasa, Budidaya, Pengolahan)	108	3	72 (2)	36 (33%)	108
Muatan Lokal***	72	2	72 (2)***		72
	1368		29 (1026)	378	1404

Gambar 1.7. Alokasi Waktu Matapelajaran SMP Penggerak

Sumber: Sekolah Penggerak, 2021

Alokasi waktu untuk mata pelajaran di sekolah penggerak berbeda dibandingkan dengan sekolah non-penggerak dan sekolah yang masih menerapkan Kurikulum 2013. Dalam sekolah penggerak, kegiatan pembelajaran berkurang sekitar 20% karena fokus pada penerapan proyek profil pelajar Pancasila. Selain itu, diharapkan sekolah penggerak juga dapat meningkatkan kompetensi kepala sekolah dan guru, selain penguatan aspek digital. Dalam dunia pendidikan khususnya sekolah penggerak dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang mampu mengoptimalkan kemampuannya untuk menghasilkan siswa yang memiliki pembiasaan mengembangkan literasi, guru di Indonesia juga memiliki standart kualifikasi yang mengacu pada permendiknas No. 16 tahun 2007 tentang standart kualifikasi dan kompetensi guru. Permendiknas tersebut menjelaskan berbagai kualifikasi dan kompetensi yang wajib dimiliki mulai guru TK/PAUD hingga pendidikan dasar dan menengah dengan masing-masing kualifikasi dan kompetensinya. Manajemen sekolah yang dikelola secara profesional akan mempengaruhi prestasi sekolah termasuk kemampuan literasi siswa.

Dalam pendidikan sumber daya juga menjadi bagian dalam penerapan berbagai program disekolah, sekolah penggerak memiliki

lima intervensi yang saling berkesinambungan salah satunya penguatan SDM sekolah. Penguatan tersebut didampingi oleh pelatih ahli yang diberikan kepada kepala sekolah, pengawas sekolah, penilik dan guru yang secara keseluruhan program pelatihan dan *coaching* terjadwal dan telah disiapkan oleh Kemdikbud. Menyadari bahwa sumber daya manusia yang kompeten merupakan modal terpenting bagi sekolah untuk mengembangkan organisasi sekolah, termasuk sekolah pada jenjang menengah atas. Efektivitas sekolah tergantung pada efektifitas sumber daya manusia yang ada di sekolah tersebut.

Kepala Sekolah juga menjadi SDM penting dan kunci keberlangsungan organisasi, kepala sekolah berperan meningkatkan efektifitas dalam membina dan memanfaatkan keahlian guru dan pegawai dengan berusaha meminimalkan kelemahan sumber daya manusia. Guru harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara professional karena tingkat keberhasilan sebuah pendidikan terletak pada guru sebagai sumberdaya manusia di dalamnya. Kurniawan (2021) mencatat berbagai cara yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan potensi SDM di sekolah baik dikota besar maupun di daerah diantaranya: “a) kualifikasi akademik guru; b) pendidikan dan pelatihan; c) uji sertifikasi; d) memberi kesempatan perbaikan pembelajaran dan e) Peningkatan kualitas dan kompetensi guru diberbagai daerah dengan mengadakan pelatihan/pembinaan strategi dan metode mengajar”.

Sarana dan prasarana sekolah penggerak juga menjadi salah satu pendukung program gerakan literasi, bahkan dalam laman sekolah penggerak disebutkan manfaat sekolah penggerak diantaranya adalah memperoleh tambahan anggaran untuk pembelian buku bagi pembelajaran kompetensi holistik yang disebut dengan bantuan oprasional (BOS) Kinerja. Mahfudh & Imron (2020) menjelaskan berdasarkan data perpustakaan nasional juga mencatat bahwa rata-rata orang Indonesia hanya membaca buku 3-4 kali perminggu dengan durasi waktu membaca per hari rata-rata 30-59 menit. Sedangkan jumlah buku

yang selesai dibaca setiap tahun rata-rata antara 5 sampai 9 buku. Kajian ini juga menunjukkan rendahnya minat baca siswa di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain. Didukung Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan penelitian ini sebagai berikut:

Dalam penelitian yang berjudul *Evaluasi Program Budaya Membaca di Sekolah Dasar (2017)* Sulistyono menyoroiti bahwa program gerakan literasi membaca di sekolah dasar sangat penting untuk menanamkan budaya membaca sejak dini. Hasil evaluasi menggunakan model CIPP menunjukkan bahwa budaya membaca terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan membaca siswa. Selanjutnya penelitian yang berjudul *Effectiveness of structured teacher adaptations to an evidence-based summer literacy program. Reading Research Quarterly (2017)* penelitian ini menemukan bahwa adaptasi terstruktur dari guru, yang memberikan buku sesuai tingkat dan minat siswa, efektif dalam meningkatkan literasi selama musim panas. Metode klaster-acak ini menunjukkan bahwa adaptasi guru yang sesuai dengan kebutuhan siswa berperan penting dalam keberhasilan program literasi.

Penelitian Analisis Implementasi Gerakan Literasi Sekolah (GLS) (2018) Widayoko dan Muhandjito meninjau implementasi GLS dan menemukan bahwa sebagian besar sekolah melaksanakan kegiatan literasi sesuai dengan tujuan nasional. Namun, ada tantangan yang diidentifikasi, termasuk kebutuhan peningkatan partisipasi dan masukan dari berbagai pihak. Demikian dalam *Effectiveness of literacy programs balancing reading and writing instruction: A meta-analysis. Reading Research Quarterly*, Graham dkk. (2018) menjelaskan meta analisis yang menunjukkan bahwa program literasi yang menyeimbangkan keterampilan membaca dan menulis meningkatkan kemampuan kedua keterampilan tersebut pada siswa. Penelitian ini menyoroiti bahwa keterampilan membaca dan menulis saling mendukung dan penting untuk dikembangkan bersama. Selanjutnya Penelitian *Scaling up successfully: Lessons from Kenya's Tusome national literacy program. Journal of Educational Change (2018)*, Piper dkk, mendapati program

literasi Tusome di Kenya menghadapi tantangan dalam penerapannya di tingkat nasional. Program ini menggunakan sistem umpan balik untuk meningkatkan hasil literasi, meskipun implementasinya bervariasi. Studi ini menyoroti pentingnya sistem pemantauan untuk keberhasilan program literasi skala nasional.

Penelitian yang berjudul *Problematika Penerapan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) Permatasari (2019)* mengidentifikasi berbagai kendala dalam pelaksanaan GLS di Indonesia, seperti rendahnya minat baca siswa, keterbatasan fasilitas, dan kurangnya dukungan sekolah dalam kegiatan literasi. Studi ini menekankan pentingnya dukungan infrastruktur untuk keberhasilan gerakan literasi. Selanjutnya Penelitian dengan Pendekatan Evaluasi CIPP dan Kickpatrick dalam Program Pengembangan Kompetensi Guru (2021) Supriyati & Muqorobin, mendapati bahwa pendekatan berbasis kebutuhan dalam pengembangan kemampuan literasi-numerasi guru dapat meningkatkan keterampilan mereka dalam penilaian siswa. Pendekatan evaluasi campuran yang digunakan membantu mengidentifikasi dampak program terhadap kualitas belajar. Penelitian Analisis Kemampuan Literasi Digital Guru di Sekolah Dasar di Wilayah Perbatasan Silvester dkk. (2022) menyoroti bahwa literasi digital menjadi alat penting bagi guru dalam proses pembelajaran di wilayah perbatasan. Guru memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi pembelajaran, serta penyampaian materi yang lebih efektif.

Selanjutnya Penelitian Program Sekolah Penggerak dan Kinerja Manajemen Kepala Sekolah, Marliyani dan Iskandar (2022) menemukan bahwa keterlibatan kepala sekolah dalam Program Sekolah Penggerak meningkatkan kinerja dan manajemen sekolah. Sosialisasi yang melibatkan kegiatan seperti KKG dan lokakarya membantu dalam memperkuat kapasitas manajemen kepala sekolah. Sementara penelitian *Evaluating an artificial intelligence literacy programme for empowering and developing concepts, literacy and ethical awareness in senior secondary students. Education and Information Technologies*, Kong dkk.

(2023) menemukan bahwa program literasi AI yang dirancang untuk siswa sekolah menengah memperkenalkan konsep AI, penggunaan praktis, dan kesadaran etika terkait. Studi ini menekankan pentingnya pendidikan literasi AI dalam mempersiapkan siswa menghadapi tantangan teknologi masa depan. Penelitian ini menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam implementasi program literasi di berbagai konteks pendidikan. Program-program ini menghadapi tantangan, tetapi mereka memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan siswa menghadapi dunia yang semakin digital.

Dari berbagai penelitian tersebut ditarik kesimpulan bahwa program literasi, baik di tingkat sekolah dasar maupun menengah, serta pengembangan kompetensi guru, sangat penting dalam meningkatkan kemampuan literasi dan manajemen pendidikan secara keseluruhan. Dibeberapa negara maju pada dasarnya juga menerapkan berbagai program untuk menghasilkan bangsa yang literat, salah satunya *Programme for the International Assessment of Adult Competencies* (PIAAC) yang merupakan suatu survei internasional yang dirancang untuk menilai keterampilan dan kompetensi orang dewasa dalam bidang literasi, numerasi, dan pemecahan masalah di lingkungan teknologi. Program ini dilakukan oleh Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dan bertujuan untuk memahami hubungan antara keterampilan orang dewasa dengan faktor-faktor sosial dan ekonomi, serta untuk membantu negara-negara dalam mengembangkan kebijakan pendidikan yang lebih efektif.

PIAAC yang dilakukan oleh OECD (2013) mengungkapkan bahwa di Finlandia, sekitar 22,2% orang dewasa berusia 16 hingga 65 tahun mencapai dua tingkat kemahiran membaca tertinggi, yaitu level 4 atau 5. Individu pada tingkat ini mampu memahami dan merespons teks yang kompleks dengan tepat, mengidentifikasi, menafsirkan, atau mengevaluasi satu atau lebih informasi, serta menarik kesimpulan yang relevan dengan menggunakan struktur teks, pengetahuan, dan perangkat

retorika. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa orang dewasa muda berusia 16–24 tahun di Finlandia memiliki tingkat kecakapan yang lebih tinggi dalam literasi, numerasi, dan pemecahan masalah dibandingkan dengan kelompok usia yang lebih tua. Dalam hal keaksaraan, dewasa muda di Finlandia menunjukkan tingkat kecakapan yang sebanding dengan rekan-rekan mereka di Jepang, Korea, dan Belanda, bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan dewasa muda di semua negara lain yang berpartisipasi dalam PIAAC.

Demikian halnya dengan Singapura, negara tersebut membangun sistem pendidikan bertujuan untuk mengasuh seluruh anak dan mengembangkan mereka menjadi pembelajar seumur hidup, dengan inti kompetensi yang bertahan lama untuk berkembang di abad ke-21. Selain membangun fondasi yang kuat dalam literasi dan numerasi, Singapura juga memenuhi kebutuhan pendidikan mereka dalam aspek fisik, estetika, moral, sosial dan emosional dan mengembangkannya secara holistik. Tujuan yang sama dengan Program sekolah Penggerak di Indonesia, selain perannya berfokus terhadap hasil belajar yang holistik siswa di Singapura mengembangkan minat dan bakat mereka di bidang musik, seni, dan olahraga melalui program ko-kurikuler dan pendidikan luar ruang (*Ministry of Education Singapore, 2022*). Sejalan dengan program sekolah penggerak yang juga mengembangkan SDM sekolah, Singapura juga membangun komitmen untuk memelihara dan memotivasi para guru untuk tumbuh dan mencapai yang terbaik secara pribadi dan profesional sejalan dengan aspirasi dan minat mereka. Para pendidik menerima pelatihan pra-jabatan yang ketat dan berbasis bukti di *National Institute of Education* dan memiliki banyak kesempatan untuk pengembangan dalam jabatan untuk membangun kompetensi mereka.

Sebagai negara maju, Amerika Serikat dan Jerman memiliki sistem pendidikan yang dirancang untuk mendorong partisipasi aktif siswa di dalam kelas. Salah satu cara yang diterapkan adalah dengan mewajibkan siswa untuk terlibat dalam berbagai kegiatan pembelajaran, seperti membaca buku dan berlatih menulis jurnal. Kegiatan membaca buku

tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan keterampilan literasi, tetapi juga untuk memperluas wawasan dan pengetahuan siswa tentang berbagai topik. Selain itu, praktik menulis jurnal memberikan kesempatan bagi siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar mereka, mengembangkan kemampuan menulis, dan mengasah keterampilan berpikir kritis. Menurut Nopilda dan Kristiawan (2018), pendekatan ini menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan interaktif, di mana siswa didorong untuk aktif berkontribusi dalam proses belajar-mengajar, sehingga dapat mempersiapkan mereka untuk tantangan di masa depan.

Penelitian ini kemudian menggunakan evaluasi program CIPP (*Context, Input, Process, Product*) dan Model Kirkpatrick untuk menjawab berbagai pertanyaan terkait efektivitas dan dampak program Gerakan Literasi di Sekolah Penggerak. Pendekatan CIPP akan menganalisis konteks yang mendasari pelaksanaan program, input yang diperlukan untuk mendukung kegiatan literasi, proses pelaksanaan program, serta produk atau hasil yang dicapai dalam peningkatan budaya literasi di sekolah. Sementara itu, Model Kirkpatrick akan digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar siswa, termasuk bagaimana program ini mempengaruhi peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa terhadap literasi.

Melalui kombinasi kedua model evaluasi ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai keefektifan program, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaannya, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan program di masa mendatang. Evaluasi CIPP dan Model Kirkpatrick akan mampu menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap efektivitas dan dampak dari program Gerakan Literasi di Sekolah Penggerak, serta untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki demi keberhasilan yang lebih baik.

Berbagai perubahan dan pengembangan dalam kurikulum serta program pendidikan dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan anak bangsa demi meningkatkan kualitas

pendidikan. Rendahnya indeks alibaca pada provinsi Jawa Barat (gambar 1.3), tercatat angka sebesar 39,47% pada tahun 2019, bersamaan dengan hasil rapor pendidikan 2022, menunjukkan bahwa SMPN 2 Ciawigebang hanya mencapai 4,44% dan SMPN 1 Kuningan mencatat 0% dalam indikator literasi. Hal ini menyoroti perlunya intervensi khusus dan segera untuk meningkatkan kemampuan literasi di kalangan siswa. Situasi yang memprihatinkan ini menciptakan urgensi untuk melakukan penelitian guna mengevaluasi efektivitas Program Gerakan Literasi di Sekolah Penggerak pada satuan pendidikan SMP di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai tantangan yang dihadapi, serta rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas literasi siswa, yang merupakan fondasi penting bagi perkembangan pendidikan yang lebih baik di daerah tersebut.

Data di atas memberikan dasar yang kuat bagi penelitian ini dan menegaskan urgensi untuk mengevaluasi program Gerakan Literasi di Sekolah Penggerak di satuan pendidikan SMP Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Menyadari sekolah penggerak adalah program pemerintah yang fokus pada pelaksanaan gerakan literasi, termasuk kegiatan 15 menit membaca sebelum pelajaran dimulai.

Kombinasi Model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) dan Kirkpatrick digunakan untuk mengevaluasi program secara menyeluruh. Model CIPP memungkinkan analisis mendalam mulai dari konteks yang mendasari program, input atau sumber daya yang diperlukan, proses pelaksanaan, hingga produk atau hasil yang dicapai. Sementara itu, Model Kirkpatrick melengkapi evaluasi dengan fokus pada empat tingkat: reaksi (tanggapan peserta terhadap program), pembelajaran (peningkatan pengetahuan atau keterampilan), perilaku (aplikasi hasil pembelajaran dalam praktik), dan hasil (dampak akhir dari program). Gabungan kedua model ini memberikan pendekatan evaluasi yang holistik, mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan area perbaikan dalam program untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutannya.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan maka, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya pemahaman guru sebagai SDM di sekolah penggerak di Kabupaten Kuningan mengenai tujuan dan visi dari menjadi sekolah penggerak. Hal ini berpotensi menghambat implementasi program yang efektif.
- 2) Pelaksanaan program literasi di sekolah penggerak belum terukur secara jelas dampaknya. Tanpa adanya pengukuran yang tepat, sulit untuk mengevaluasi dampak dari program literasi terhadap peningkatan kualitas pendidikan.
- 3) Perbedaan pelaksanaan program literasi antara sekolah penggerak dan sekolah non-penggerak belum diketahui secara jelas. Hal ini menyulitkan untuk mengidentifikasi keunggulan atau kekurangan dari penerapan program literasi di masing-masing tipe sekolah.
- 4) Kendala sarana dan prasarana yang dihadapi oleh sekolah penggerak dalam menerapkan program Gerakan Literasi Sekolah. Keterbatasan fasilitas yang mendukung pelaksanaan program dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi gerakan literasi di sekolah.

1.3 Pembatasan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan di atas, peneliti berupaya untuk membatasi permasalahan pada evaluasi program gerakan literasi sekolah penggerak di kabupaten Kuningan menggunakan model CIPP dan *Kirkpatrick*.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut maka dalam penelitian ini dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana program gerakan literasi di sekolah penggerak dalam konteks tujuan program, kesesuaian tujuan program, visi misi dan rapor pendidikan (*context*)?

2) Bagaimana program gerakan literasi di sekolah penggerak dalam konteks segi ketepatan desain program, pemilihan tim literasi, kelengkapan sarana dan prasarana, serta keakuratan penyusunan anggaran (*input*)?

3) Bagaimana program gerakan literasi di sekolah penggerak dalam konteks efektifitas desain program, kinerja tim literasi, efektivitas sarana dan prasarana, serta efektivitas anggaran program (*process*)?

4) Bagaimana program gerakan literasi di sekolah penggerak dalam konteks pembentukan karakter siswa (*product*)?

5) Bagaimana dampak program gerakan literasi di sekolah penggerak, ditinjau dari variabel X1, X2, X3, dan X4, terhadap variabel Y (karakter dan perilaku siswa) pada indikator meningkatkan keunggulan perilaku pembelajaran (*behavior*)?

6) Bagaimana dampak program gerakan literasi di sekolah penggerak, ditinjau dari variabel X1, X2, X3, dan X4, terhadap variabel Y (karakter dan perilaku siswa) pada indikator menciptakan iklim pembelajaran yang positif (*results*)?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1) Program gerakan literasi sekolah penggerak kabupaten Kuningan ditinjau dari tujuan program gerakan literasi, kesesuaian tujuan program gerakan literasi, kesesuaian dengan hasil rapor pendidikan (*context*).

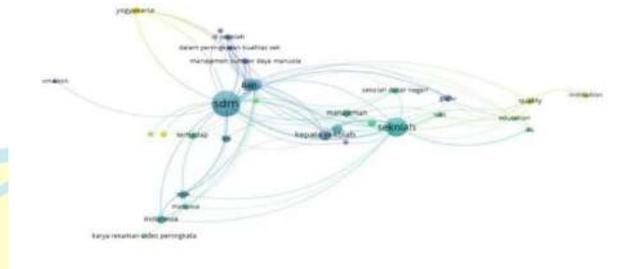
2) Program gerakan literasi sekolah penggerak kabupaten Kuningan ditinjau dari ketepatan desain program, ketepatan menentukan tim literasi, ketepatan sarana dan prasarana dan ketepatan menyusun anggaran (*input*).

3) Program gerakan literasi sekolah penggerak kabupaten Kuningan ditinjau dari keefektifan desain program, keefektifan tim literasi, keefektifan sarana dan prasarana dan keefektifan anggaran program

pada penelitian sebelumnya penelitian banyak membahas tentang implementasi sekolah penggerak, kurikulum merdeka, manajemen sekolah, guru penggerak dan guru sekolah penggerak.

Logo UNJ RTNBR RGB_Logo_Only.jpg 986x994 piksel

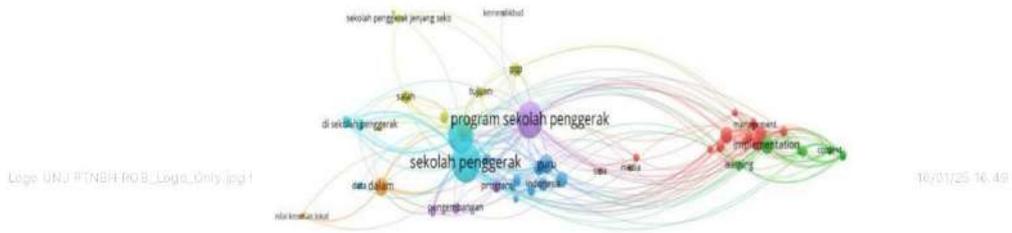
16/01/25 16:48



Gambar 1.9. Tampilan VOSviewer SDM Sekolah

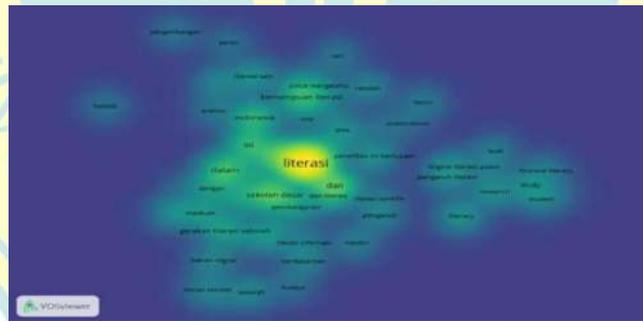
Studi tentang Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan sekolah, berdasarkan data dari 2016 hingga 2022, terbagi dalam lima kelompok kajian utama yang mencakup berbagai aspek manajemen dan pengembangan SDM. Banyak penelitian menyoroti peran kepala sekolah sebagai pemimpin utama dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan produktif. Selain itu, manajemen sekolah menjadi topik utama, dengan fokus pada strategi pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan, perencanaan kebutuhan SDM, serta peningkatan kapasitas profesional melalui pelatihan dan pengembangan.

Penelitian lainnya menyoroti upaya meningkatkan mutu pendidikan melalui berbagai pendekatan, seperti pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, penilaian kinerja guru, dan penerapan teknologi untuk mendukung pembelajaran. Beberapa studi juga mengeksplorasi pentingnya kerjasama antara sekolah dan pihak eksternal, termasuk pemerintah dan komunitas, untuk memperkuat dukungan terhadap pengembangan SDM sekolah. Secara keseluruhan, kajian-kajian ini menunjukkan bahwa kualitas SDM sangat memengaruhi efektivitas pendidikan dan menjadi faktor penting dalam pencapaian tujuan sekolah yang lebih besar, termasuk peningkatan prestasi siswa dan pemenuhan standar pendidikan nasional.



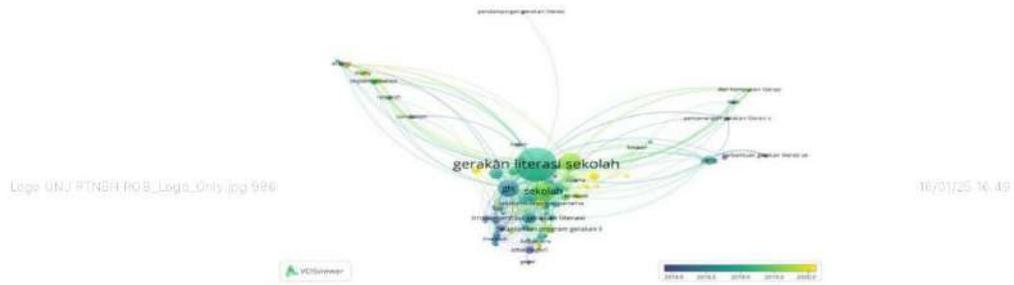
Gambar 1.10. Tampilan VOSviewer Guru di Sekolah Penggerak

Artikel terpublikasi berkaitan sekolah penggerak terdapat 292 artikel, program sekolah penggerak berada pada cluster 1, SD dan SMA Penggerak ada pada cluster 4 sementara artikel SMP penggerak belum ditemui. Selanjutnya melalui visualisasi SDM sekolah penggerak juga berwarna abu-abu sehingga penelitian tentang SDM sekolah penggerak perlu terus ditingkatkan.



Gambar 1.11. VOSviewer visualisasi SDM sekolah penggerak

Berikut adalah *state of the art* mengenai Gerakan Literasi Sekolah yang berkembang sejak tahun 2018 hingga 2020, yang terbagi dalam 7 kluster utama. Peneliti-peneliti banyak membahas berbagai aspek terkait implementasi gerakan literasi, pelaksanaan program literasi, serta aktivitas literasi yang dilakukan di sekolah.



Gambar 1.12. Tampilan VOSviewer Gerakan Literasi Sekolah

Dalam kajian ini, fokus utama adalah bagaimana gerakan literasi dapat diterapkan secara efektif di sekolah-sekolah, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Selain itu, penelitian juga menyoroti berbagai program gerakan literasi yang telah diadakan, baik yang berbasis pada kebijakan pemerintah maupun inisiatif dari masing-masing sekolah. Pembahasan lebih lanjut mencakup upaya untuk mengintegrasikan budaya literasi ke dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah, serta strategi-strategi yang digunakan untuk mendorong keterlibatan aktif siswa dalam kegiatan literasi. Penelitian ini juga menunjukkan pentingnya kolaborasi antara guru, siswa, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem literasi yang mendukung perkembangan kompetensi literasi di tingkat sekolah.